

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab. 2002, Analisis Kebijakan, Dari Formulasi
KeImplementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Creswell, J. W. 2007, *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches*. 2nd edn. California: Sage.
- Creswell, John W. 2014. Terjemahan: *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendy, Onong Uchjana. 1996. Sistem Informasi Manajemen. Bandung: Mandar
Maju.
- Enceng, E. (2008). Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam
mewujudkan *good governance*. *Civil Service Journal*, 2(1).
- Fildzawati, F. E. (2017). Evaluasi Penerapan Tata Kelola Yang Baik Dalam
Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Di Provinsi Jawa
Tengah (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Hidayat, Wahyu dan Budi Harjanto. 2013. Konsep Dasar Penilaian Properti, Edisi
pertama, Yogyakarta: BPFE UGM.
- Inu Kencana Safei. 2007. Good Government. Jakarta: Rineka Cipta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 Tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Daerah Menteri Dalam Negeri. Jakarta.
- Nofianti Leny, (2015). *Public Sector Governance Pada Pemerintah Daerah*,
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Mahmudi, 2007, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 1999. Prinsip-Prinsip Manajemen Dalam Pembiayaan Desentralisasi.
Yogyakarta: FE-UGM.

Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, *Good Governance Democratization, Local Government Financial Management, Public Policy, Reinventing Government, Accountability Probity, Value for Participatory Development*. Serial Otonomi Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo. 2009, Akuntansi Sektor Publik. Cetakan Keempat. Yogyakarta: Penerbit Andi.

OECD. 2015. *Development Co-operation Report*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Milik Daerah.

Salle, A. (2017). Makna transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal kajian ekonomi dan keuangan daerah*, 1(1).

Sedarmayanti. 2012. *Good Governane dan Good Cooperate*. Jakarta: PT. Bumi aksara.

- Singal, A. (2015). Penataan Daerah Dalam Mewujudkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Berkaitan Dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Lex Administratum*, 3(8).
- Siregar, Doli. D. 2004. *Management Asset* Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono, 2004, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tsetsura, K., & Luoma-aho, V. (2020). *Transparency and Corruption in the Public Sector. The Handbook of Public Sector Communication*, 71–79.
- Yin, R. K. (2009). *Case Study Research: Design and Methods* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

